



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2018**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

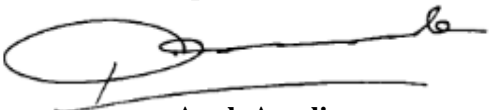
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan izin-Nya BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018.

Laporan ini dibuat dalam rangka merealisasikan reformasi birokrasi dan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan terselenggaranya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan ini berisi tentang *overview*, target dan pencapaian kinerja selama tahun 2018 serta analisis atas pencapaian kinerja yang telah dicapai sebagai upaya perbaikan manajemen kinerja di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berharap laporan ini mampu menjawab kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas lembaga negara serta informasi di dalamnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan memberi data-data bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Batam, 31 Januari 2019
Plt. Kepala Perwakilan



Ayub Amali
NIP 196903211996031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2
C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.....	3
D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.....	7
B. PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. CAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018.....	18
B. REALISASI ANGGARAN BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018.....	34
C. PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018.....	35
BAB IV PENUTUP.....	37
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23E, 23F dan 23G serta TAP MPR RI No. VI/MPR/2002, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara. Hal ini ditegaskan dalam TAP MPR RI No. VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara serta untuk melaksanakan amanat Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23G ayat (1) yang berbunyi “Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi”, maka berdasarkan Keputusan Ketua BPK RI Nomor 34/K/I-VIII.3/6/2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2007 dibentuk Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang yang berkedudukan di Batam. Selanjutnya, Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang diresmikan pada tanggal 29 November 2007.

Pada perkembangannya, Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur. Sesuai dengan Keputusan Ketua BPK RI Nomor 01/K/I-XIII.2/1/2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Nama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang berubah menjadi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Ketua BPK RI Nomor 03/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana, BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berubah menjadi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai dengan TAP MPR nomor XI/MPR/1998, Undang Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; pemerintah telah menerbitkan instruksi presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lebih lanjut, pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 13 dinyatakan bahwa instansi yang berkewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (a) Kementerian/Lembaga (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit Kerja

Mandiri yang ditetapkan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, laporan akuntabilitas kinerja ini disusun.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas pokok berupa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas-entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, menyebutkan bahwa organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditorat Utama Keuangan Negara V. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari.

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum dan hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Pengurusan SDM, keuangan, serta sarana dan prasarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;

- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan persiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- f. Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau; dan
- g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

2. Sub Auditorat Kepulauan Riau

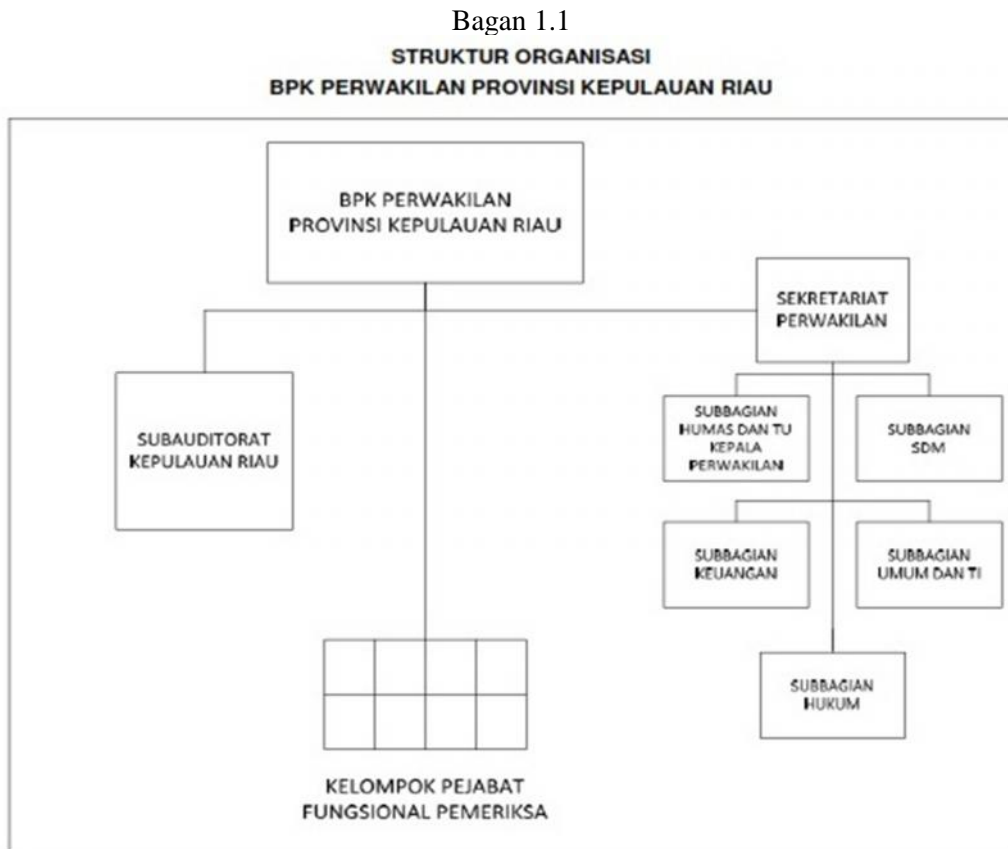
Sub Auditorat Kepulauan Riau mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, untuk.

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengusulkan tim pemeriksa;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP.

Selain itu, Sub Auditorat Kepulauan Riau bertugas untuk menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

3. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.



Sumber: Keputusan Ketua BPK No.3/K/I-VIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK

D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sumber daya manusia yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2018 berjumlah 89 orang yang terdiri dari.

- a. Kepala Perwakilan : 1 (Satu) orang
- b. Kepala Sekretariat : 1 (Satu) Orang
- c. Kepala Sub Auditorat : 1 (Satu) orang
- d. Kepala Sub Bagian : 5 (Lima) orang
- e. Staf : 63 (Enam Puluh Tiga) orang
- f. Tenaga Kontrak : 18 (Delapan Belas) orang

Sarana dan prasarana yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.

- a. Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Jl. Raja Isa, Batam Center, Batam;
- b. Rumah Jabatan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Perumahan Sukajadi Jl. Cemara Bukit No. 1, Batam;
- c. Rumah Jabatan Eselon III & IV sejumlah 8 (delapan) unit yang beralamat di Perumahan Costarica Residence Cluster Monterrey Nomor 01 s.d. 6 dan 71, Jl. Raja Isa, Batam Center, Batam
- d. Mess BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Batam Center, Kota Batam

Selain itu, pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 adalah sebesar Rp18.609.632.000,00 yang terdiri dari anggaran RKP sebesar Rp6.452.390.000,00 dan anggaran RKSP sebesar Rp12.157.242.000,00.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Sesuai fungsinya sebagai satker pelaksana BPK RI, maka perencanaan strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengikuti Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini rencana strategis (renstra) BPK RI Tahun 2016-2020 yang tertuang dalam Keputusan BPK RI nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 serta rencana implementasi renstra BPK RI yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016.

1. Gambaran Umum BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

a. Kedudukan dan Dasar Hukum

BPK RI merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang secara hukum diatur dalam UUD 1945 pada pasal 23E, 23F, dan 23G serta Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK RI juga didukung oleh seperangkat UU di bidang keuangan negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan perundangan-undangan tersebut, secara bersama-sama menegaskan kedudukan dan peran BPK RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau didirikan Tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan BPK RI 39/K/I-VIII.3/7/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu unsur pelaksana BPK RI yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V) dan bertanggungjawab kepada Anggota V BPK RI melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama V).

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari: (i) Pemeriksaan keuangan, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat

kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah; (ii) Pemeriksaan kinerja, meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan pemerintah daerah dan lembaga terkait di lingkungan pemerintah daerah; dan (iii) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas permintaan (*audit on request*).

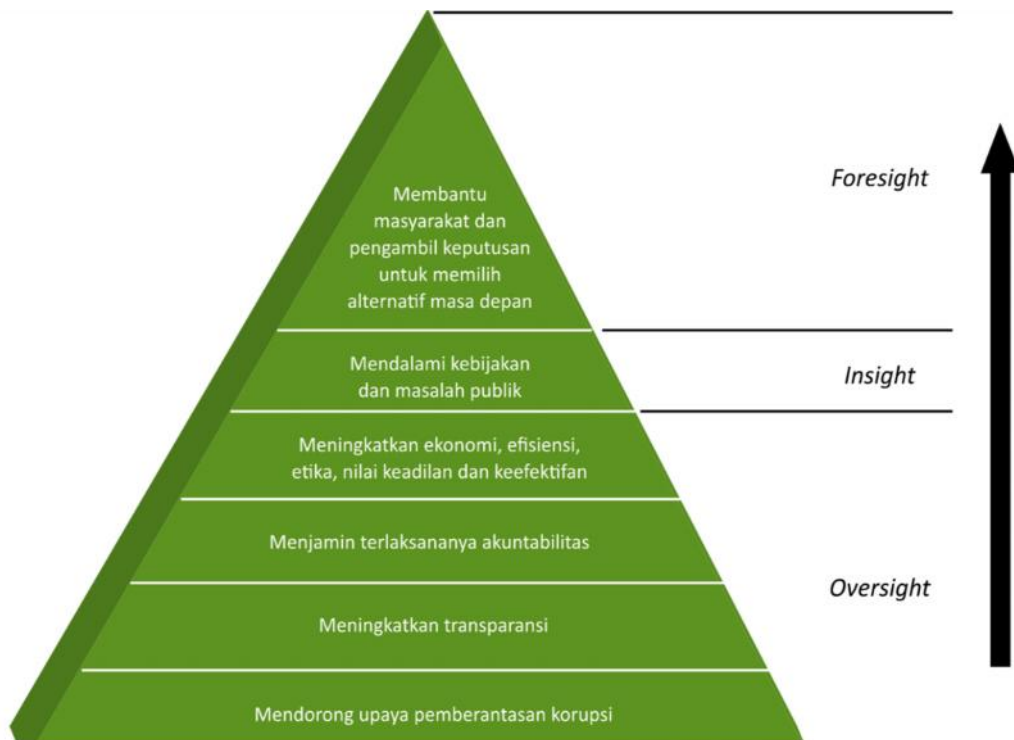
c. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan atas hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, meliputi lembaga perwakilan (DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi penegak hukum), lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang warga negara Indonesia.

d. Arah Pengembangan Lima Tahunan (2016 – 2020)

Arah pengembangan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk lima tahunan (2016-2020) dititikberatkan pada peningkatan peran BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan peran tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan serta peningkatan mutu kelembagaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang modern dan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan arah pengembangan BPK RI seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 1
Segitiga Pengembangan BPK RI



BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan daerah dengan memberikan perhatian secara proporsional pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berupaya untuk dapat memberikan penilaian dan pendapat atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan BPK RI secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK RI yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme.

2. Isu Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil analisis SWOT atas kerangka pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2016 – 2020, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi, isu-isu strategis BPK Perwakilan Provinsi Riau 2016 – 2020 meliputi hal-hal berikut.

- a. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau oleh para pengelola keuangan negara;

- b. Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara;
- c. Selama ini terdapat beberapa harapan masyarakat terhadap BPK yang tidak dapat dipenuhi karena bukan merupakan tugas dan kewenangan BPK untuk menjawab harapan tersebut;
- d. Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan;
- e. Penyempurnaan proses bisnis melalui optimasi pemanfaatan TIK;
- f. Peningkatan kompetensi SDM di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- g. RPJM 2015-2019.

3. Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

a. Visi

Menjadi perwakilan BPK yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

b. Misi

- 1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau beserta BUMD;
- 2) Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

c. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misinya BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut.

Independensi

Menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

Integritas

Membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Profesionalisme

Membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Tujuan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Melalui pelaksanaan misinya, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut.

- a. Peningkatan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara;
- b. Peningkatan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Dalam mewujudkan visi dan misi 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan tujuh target kinerja yang merupakan target pencapaian sasaran strategis satker sebagai berikut.

Tabel 2.1 Target Kinerja 2016 – 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target IKU				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	62%	64%	67%	70%
		IKU 1.2. Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,7	3,9	4,0	4,1
		IKU 1.3. Persentase Penyampaian LHP yang mengandung unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 1.4. Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 1.5. Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 1.6. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	1
2	SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	85%	85%	85%
		IKU 2.2. Hasil Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	22%	22%	22%	22%	22%
		IKU 2.3. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
3	SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1. Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 3.2. Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target IKU				
			2016	2017	2018	2019	2020
		IKU 3.3. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
4	SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1. Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 4.2. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	22	22	22	22	22
		IKU 4.3. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
5	SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu	IKU 5.1. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Bengkulu	A	A	A	A	A
		IKU 5.2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 5.3. Persentase Penyusunan <i>Best Practice</i>	0%	0%	0%	0%	0%
		IKU 5.4. Persentase Penyebaran <i>Best Practice</i>	0%	0%	0%	0%	0%
		IKU 5.5. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Bengkulu	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 5.6. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 5.7. Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2	2	2	2
6	SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu	IKU 6.1. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 6.1. Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non pemeriksaan)	90%	90%	90%	90%	90%
7	SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu	IKU 7.1. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu	80%	83%	85%	87%	90%

5. Sasaran Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai berikut.

a. Peningkatan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (SS 1)

Di dalam Renstra 2016 - 2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK RI digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau bagi pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akan difokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator.

- 1) Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan;
- 2) Persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH;
- 3) Tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara;
- 4) Tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli;
- 5) Jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi target pada indikator poin 1 sampai dengan 4 yaitu mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sedangkan kegiatan yang untuk poin 5 yaitu merumuskan, mereviu dan menyiapkan bahan rumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

b. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (SS 2)

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan yang diwujudkan dalam kegiatan mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan perwakilan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi perwakilan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator.

- 1) Tingkat konsistensi antara rencana pemeriksaan dengan pelaksanaan pemeriksaan;
- 2) Rasio jumlah LHP kinerja terhadap seluruh LHP.

c. Peningkatan Kualitas Hasil Pemeriksaan di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (SS3)

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik serta sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan melalui *quality control* dan *quality assurance* pemeriksaan. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator.

- 1) Pemenuhan *quality control* (QC) pemeriksaan;
- 2) Pemenuhan *quality assurance* (QC) pemeriksaan;
- 3) Tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHP;
- 4) Indeks kepuasan *auditee* atas kinerja pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- 5) Ketepatan waktu penyampaian LHP;
- 6) Persentase LHP yang digugat dan dinyatakan menang.

d. Peningkatan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (SS4)

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara/daerah. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara di seluruh instansi pemerintah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dan BUMD.

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau ingin memastikan proses penetapan kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Di samping itu, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan berupaya untuk dapat menyajikan *database* status penyelesaian ganti kerugian negara yang lengkap,

akurat dan tepat waktu sehingga dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator.

- 1) Tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 2) Jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- 3) Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara ke Ditama Revbang.

e. Peningkatan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (SS5)

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berupaya meningkatkan kualitas organisasi melalui penyempurnaan proses bisnis.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator.

- 1) Hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- 2) Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi;
- 3) Jumlah usulan *best-practice*;
- 4) Persentase penyebaran *best-practice*;
- 5) Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- 6) Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan;
- 7) Jumlah *media relation* yang dilaksanakan;
- 8) Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana;
- 9) Tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin.

f. Peningkatan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (SS6)

Sebagai lembaga profesi, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan dunia pemeriksaan. Selain itu, BPK perlu menyediakan suatu lingkungan dan budaya kerja yang kondusif sehingga BPK menjadi tempat yang nyaman bagi pegawai untuk membangun karir dan kompetensi.

Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator:

- 1) Persentase pemeriksaan yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa;
- 2) Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa).

g. Peningkatan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (SS7)

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan serta pertanggungjawaban anggaran BPK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

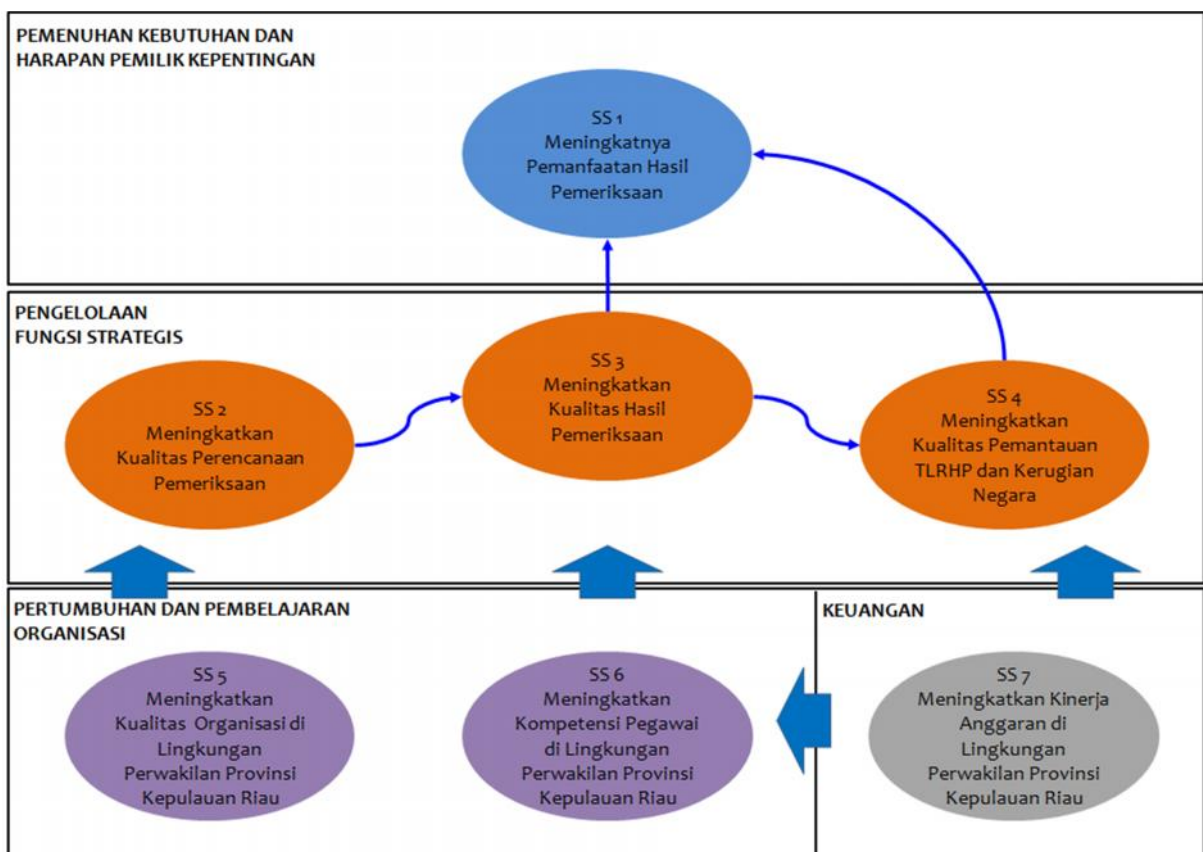
Di samping pertanggungjawaban anggaran, sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur melalui tingkat kinerja implementasi anggaran.

6. Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis demi terwujudnya visi dan misi dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai dengan fungsinya sebagai satker pelaksana BPK RI yang berada di bawah AKN V, maka BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 menetapkan target pencapaian kinerja yang tercantum dalam peta strategi sebagai berikut:

Gambar 2.2
Peta Strategi BPK Perwakilan Kepulauan Riau Tahun 2018



B. PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018

Dalam rangka melaksanakan rencana implementasi renstra telah dilaksanakan penandatanganan Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK RI oleh seluruh satker. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja yang juga ditandatangani oleh satker BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dalam lampiran laporan ini.

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018.

Tabel 2.2
Target Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2018
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan Yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	31%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemanatauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	16
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,1
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	94%
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	1
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IK 3.2.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2018

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mendapat skor pencapaian kinerja tahun 2018 sebesar 98,28. Skor ini mengalami penurunan dibandingkan skor tahun 2017 yakni sebesar 99,88. Rincian pencapaian kinerja selama 2018 pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2018

Indikator Kinerja		Target 2018	Realisasi 2018	Skor 2018
SS 1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan			
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	59,97%	92,26
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan Yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100
S 1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan			
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	100%	105
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	31%	31,25%	100,81
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	80%	100
S 1.2	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara			
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	16	16	100
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100
S 2.1	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan			
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,1	4,67	105
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100
IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100
S 3.1	Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan			
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	5,0	3,42	68,4
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	4,73	94,6
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100
S 3.2	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan			
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	BB	88,89
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	83,37%	104,21
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	1	100

Indikator Kinerja		Target 2018	Realisasi 2018	Skor 2018
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	100
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	94%	94,09	100,09
IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	1	1,6	105
S 3.3	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan			
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100
IK 3.2.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100
S 3.4	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan			
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	82,03%	96,5

2. Penjelasan Pencapaian Kinerja Tahun 2018

SS 1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU 1.1 adalah IKU yang mengukur persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh *auditee* telah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Target pencapaian kinerja tahun 2018 untuk IKU 1.1 adalah 65% dengan realisasi sebesar 59,97%.

Tabel 3.2
IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Nama IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan	65%	59,97%	59,97%	61,19%	54,68%	63,17%

Capaian IKU 1.1. tahun 2018 sebesar 59,97% belum mencapai target yang diharapkan yakni 65% karena sebagian besar entitas telah menindaklanjuti rekomendasi, namun rekomendasi yang ditindaklanjuti masih belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut. Selama tahun 2014 – 2018, baru 1.411 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dari 2.352 rekomendasi BPK.

Selain kondisi tersebut, masalah yang ditemui adalah kecenderungan kurangnya kesadaran entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, khususnya kurang proaktifnya entitas dalam mengupayakan percepatan penyelesaian tindak lanjut.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya meningkatkan kesadaran dan mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Salah satu upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penyelesaian tindak lanjut adalah menyelenggarakan Workshop Evaluasi Penggunaan SIPTL Versi 1 dan Pengenalan SIPTL Versi 2 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh pegawai

pemeriksa, admin dan inputer SIPTL dari entitas sebagai peserta, serta pegawai Direktorat EPP sebagai narasumber.



Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian IKU 1.1 seperti kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta pelaksanaan Workshop Evaluasi Penggunaan SIPTL Versi 1 dan Pengenalan SIPTL Versi 2, diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.3
Rincian Anggaran dan Belanja Pendukung IKU 1.1 (Rupiah)

Nama Keluaran	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	185.868.000,00	151.054.105,00	81,27

IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

IKU 1.2 disusun untuk mendorong dan meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 8 ayat 3, BPK juga diamanatkan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasi pidana ke IPH. Apabila belum terdapat temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dari LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada IPH, perwakilan tetap mendapat nilai sebesar 100%.

Tabel 3.4
IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

Nama IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Persentase Penyampaian LHP Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%	-

IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

Semakin banyaknya permintaan penghitungan kerugian negara/daerah oleh IPH kepada BPK menunjukkan kepercayaan atas profesionalisme para pemeriksa BPK dan lembaga BPK. Selain itu berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 11 huruf c, dinyatakan BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. IKU 1.3 juga bertujuan untuk mendorong peran BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana korupsi baik yang menyebabkan kerugian negara atau tidak. Apabila belum terdapat permintaan perhitungan kerugian negara, perwakilan tetap mendapat nilai sebesar 100%.

Tabel 3.5
IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

Nama IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%	-

IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan Yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

IKU 1.4 mengukur jumlah usulan pendapat dari perwakilan yang dimanfaatkan oleh Ditama Revbang sebagai bahan perumusan pendapat yang akan disampaikan kepada para pemilik kepentingan. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah menyampaikan bahan pendapat ke Direktorat EPP melalui Nota Dinas No. 219/ND/XVIII. TJP.2/8/2018 perihal Usulan Bahan Pendapat. Masalah yang diangkat pada usulan bahan pendapat tersebut adalah “Pemberian Tambahan Penghasilan dan Insentif oleh Pemerintah Daerah”.

Melalui Nota Dinas No. 532/ND/XII.2/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal Penyampaian Tanggapan atas Usulan Bahan Pendapat, Direktorat EPP menerima usulan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sehingga realisasi IKU 1.4 adalah 1 bahan pendapat.

Tabel 3.6
IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan Yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan Yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	1	2

Untuk mencapai realisasi IKU 1.4 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.7
Rincian Anggaran dan Belanja Pendukung IKU 1.4 (Rupiah)

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
Rumusan Bahan Pendapat	16.185.000,00	15.050.600,00	92,99

S 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan

Penilaian terhadap IK 1.1.1 merupakan penilaian atas realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang mengacu pada strategi pemeriksaan BPK. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah mengirimkan isian formulir IK Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan melalui Nota Dinas No. 8/ND/XVIII.TJP/1/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Penyampaian Formulir Input IKU Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan dan IKU Tingkat Evaluasi LHP Tahun 2018. Hasil evaluasi Direktorat PSMK menunjukkan bahwa tingkat implementasi strategi pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 sebesar 100%, sama dengan target 100%.

Tabel 3.8
IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan

IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	90%	100%	100%	-	-	-

IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP

IK 1.1.2 bertujuan untuk mendorong bertambahnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja. BPK diarahkan pada pelaksanaan *insight* yang dilakukan melalui pemeriksaan kinerja. Selain itu, dalam mengawal RPJMN, DPR meminta agar BPK meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja.

Rasio jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP yang dihasilkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 adalah 31,25%, lebih tinggi dari target 31%.

Tabel 3.9
IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP

IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP	31%	31,25%	31,25%	26,67%	38,89%	-

Pada tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan pemeriksaan kinerja dan telah menerbitkan 5 (lima) LHP kinerja dari total 16 LHP (kecuali LHP Banpol) yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.10
Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tahun 2018

No	Judul LHP
1	Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas serta instansi terkait atas efektivitas upaya pmda dalam mengelola pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS dan PIP serta Pendanaan pendidikan sejenis lainnya oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun untuk TA 2015-2018 (Semester I)
2	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Natuna dan instansi terkait
3	Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Karimun dan instansi terkait lainnya atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015 s.d. Semester I TA 2018
4	Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bintan dan instansi terkait lainnya atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi dana Desa TA 2015 s.d. Semester I TA 2018
5	Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Batam TA 2017 dan 2018

Untuk mencapai realisasi IK 1.1.2 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.11
Rincian Anggaran dan Belanja Pendukung IK 1.1.2 (Rupiah)

No	Judul LHP	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas serta instansi terkait atas efektivitas upaya pmda dalam mengelola pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS dan PIP serta Pendanaan pendidikan sejenis lainnya oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun untuk TA 2015-2018 (Semester I)	368.509.000,00	349.917.259,00	94,95
2	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Natuna dan instansi terkait	351.619.000,00	346.255.525,00	90,78
3	Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Karimun dan instansi terkait lainnya atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015 s.d. Semester I TA 2018	341.410.000,00	327.819.720,00	96,02
4	Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bintan dan instansi terkait lainnya atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi dana Desa TA 2015 s.d. Semester I TA 2018	334.729.000,00	319.209.559,00	97,94
5	Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Batam TA 2017 dan 2018	143.671.000,00	139.380.221,00	97,01

IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP

IK ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah mengirimkan isian formulir IK Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan melalui Nota Dinas No.

8/ND/XVIII.TJP/1/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Penyampaian Formulir Input IKU Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan dan IKU Tingkat Evaluasi LHP Tahun 2018. Hasil evaluasi Direktorat PSMK menunjukkan tingkat evaluasi LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 sebesar 80%, sama dengan target 80%.

Tabel 3.12
IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP

IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Tingkat Evaluasi LHP	80%	80%	80%	-	93,67%	-

S 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IK ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat diperiksa. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada tahun 2018 telah dilaksanakan dua kali sehingga tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 100%. Pemantauan tindak lanjut Semester I 2018 dilaksanakan 9 - 10 Juli 2018, sedangkan pemantauan tindak lanjut Semester II 2018 dilaksanakan 19 - 21 Desember 2018. Realisasi IK 1.2.1 sama dengan target tahun 2018 yakni 100%.

Tabel 3.13
IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	-

Untuk mencapai realisasi IK 1.2.1 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.14
Rincian Anggaran dan Belanja Pendukung IK 1.2.1 (Rupiah)

Nama Keluaran	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	185.868.000,00	151.054.105,00	81,27

IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

IK 1.2.2 mengukur jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara yang diterbitkan. Pada tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menargetkan capaian IK 1.2.2 sebesar 16 laporan dengan rincian 8 laporan pada Semester I dan 8 laporan pada Semester II. Realisasi IK 1.2.2 sama dengan target tahun 2018 yakni 16.

Tabel 3.15
IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	16	16	16	16	16	16

Untuk mencapai realisasi IK 1.2.2 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.16
Rincian Anggaran dan Belanja Pendukung IK 1.2.2 (Rupiah)

Nama Keluaran	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah	350.028.000,00	255.624.059,00	73,03

IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

IK ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah, baik ke Ditama Revbang maupun penginputan ke aplikasi SIKAD. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat menyampaikan seluruh laporan pemantauan penyelesaian kerugian daerah baik pada Semester I dan Semester II 2018 dengan tepat waktu. Realisasi IK 1.2.3 tahun 2018 adalah sebesar 100%, dengan target sebesar 100%.

Tabel 3.17
IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%

S 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan

IK 2.1.1 bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui *quality control* oleh Pajabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan *quality assurance* oleh Pajabat Struktural Pemeriksaan (PSP). BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja dan DTT Non Banpol sehingga menghasilkan 16 LHP pada tahun 2018. Pelaksanaan *quality control* dan *quality assurance* telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP sehingga realisasi IK 2.1.1 sebesar 100% atau sama dengan target tahun 2018 yakni 100%.

Tabel 3.18
IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan

IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	-

IK 2.1.2 Indeks Kepuasan *Auditee* Atas Kinerja Pemeriksa BPK

IK 2.1.2 mengukur tingkat kepuasan *auditee* atas pelaksanaan pemeriksaan dan sebagai umpan balik atas independensi, integritas, dan profesionalisme pemeriksa BPK.

Target pencapaian kinerja untuk IK 2.1.2 tahun 2018 adalah 4,1 dengan realisasi sebesar 4,67. Hal ini menunjukkan bahwa *auditee* menilai bahwa rata-rata kinerja pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pemeriksaan berada dalam kategori sangat memuaskan. Tabel dibawah juga menunjukkan tren kenaikan indeks kepuasan *auditee* selama tiga tahun terakhir.

Tabel 3.19
IK 2.1.2 Indeks Kepuasan *Auditee* Atas Kinerja Pemeriksa BPK

Nama IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> Atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,1	4,67	4,67	4,42	4,45	-

IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

IK ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran terhadap ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas/*stakeholder*. Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan.

Pada tahun 2018, BPK Perwakilan Kepulauan Riau telah menerbitkan 24 LHP dan dapat menyampaikan seluruh LHP dengan tepat waktu sehingga realisasi IK 2.1.3 sebesar 100%.

Tabel 3.20
IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	92,31%	100%

Tabel 3.21
Realisasi Penyampaian LHP dan Anggaran Pemeriksaan LKPD TA 2017

No	Entitas	Tanggal Penyerahan LHP	Realisasi Anggaran	Persentase dari Anggaran
1	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	21 Mei 2018	485.351.572,00	95,47
2	Kota Batam	25 Mei 2018	161.673.582,00	94,96
3	Kota Tanjungpinang	25 Mei 2018	679.873.470,00	99,13
4	Kabupaten Bintan	25 Mei 2018	349.243.662,00	94,96
5	Kabupaten Karimun	25 Mei 2018	341.730.384,00	92,27
6	Kabupaten Natuna	25 Mei 2018	371.105.376,00	92,42

7	Kabupaten Lingga	25 Mei 2018	288.803.095,00	97,23
8	Kabupaten Kepulauan Anambas	25 Mei 2018	311.273.654,00	97,77

Tabel 3.22

Realisasi Penyampaian LHP dan Anggaran Pemeriksaan DTT Bantuan Partai Politik TA 2017

No	Entitas	Tanggal Penyerahan LHP	Realisasi Anggaran	Persentase dari Anggaran
1	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	12 April 2018	7.062.700,00	85,23
2	Kota Batam	12 April 2018	6.940.000,00	83,75
3	Kota Tanjungpinang	12 April 2018	7.060.000,00	85,19
4	Kabupaten Bintan	12 April 2018	6.675.900,00	80,56
5	Kabupaten Karimun	12 April 2018	6.990.000,00	84,35
6	Kabupaten Natuna	12 April 2018	7.293.000,00	88,01
7	Kabupaten Lingga	12 April 2018	7.063.000,00	85,23
8	Kabupaten Kepulauan Anambas	12 April 2018	6.572.700,00	79,13

Tabel 3.23

Realisasi Penyampaian LHP dan Anggaran Pemeriksaan Kinerja Tahun 2018

No	Entitas	Tanggal Penyerahan LHP	Realisasi Anggaran	Persentase dari Anggaran
1	Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas serta instansi terkait atas efektivitas upaya pemda dalam mengelola pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS dan PIP serta Pendanaan pendidikan sejenis lainnya oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun untuk TA 2015-2018 (Semester I)	26 Desember 2018	349.917.259,00	94,95
2	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumbang Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Natuna dan instansi terkait	26 Desember 2018	346.255.525,00	90,78
3	Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Karimun dan instansi terkait lainnya atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015 s.d. Semester I TA 2018	26 Desember 2018	327.819.720,00	96,02
4	Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bintan dan instansi terkait lainnya atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi dana Desa TA 2015 s.d. Semester I TA 2018	26 Desember 2018	319.209.559,00	97,94
5	Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Batam TA 2017 dan 2018	19 November 2018	139.380.221,00	97,01

Tabel 3.24
Realisasi Penyampaian LHP dan Anggaran Pemeriksaan DTT Non Banpol Tahun 2018

No	Entitas	Tanggal Penyerahan LHP	Realisasi Anggaran	Persentase dari Anggaran
1	Pemeriksaan atas pengadaan barang untuk dihibahkan pada Pemerintah Prov. Kepulauan Riau TA 2018	26 Desember 2018	179.140.000,00	95,49
2	Pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Tanjungpinang TA 2018	26 Desember 2018	174.144.100,00	95,90
3	Pemeriksaan atas belanja modal infrastruktur jalan dan jembatan pada Pemerintah Kota Batam TA 2018	26 Desember 2018	173.634.648,00	95,85

IK 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK

Pada tahun 2018, tidak ada gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Apabila tidak ada LHP yang digugat dan BPK dinyatakan menang, perwakilan tetap mendapat nilai sebesar 100%.

Tabel 3.25
IK 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK

IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100%	100%	-	-

S 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan

IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman pegawai terhadap visi, misi dan nilai dasar BPK. IK 3.1.1 adalah IK yang baru diukur pada tahun 2018. Pengukuran IK ini dilakukan melalui survey kepada pegawai. Target yang ditetapkan untuk IK ini pada tahun 2018 adalah 5. Hasil survey atas IK 3.1.1 adalah 3,42, yang menunjukkan bahwa masih kurangnya tingkat pemahaman pegawai terhadap visi, misi dan nilai dasar BPK.

Untuk meningkatkan capaian IK ini, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan peningkatan upaya internalisasi visi, misi dan nilai dasar melalui sosialisasi, surat edaran dan pemanfaatan media publikasi seperti poster atau *banner* tentang visi, misi dan nilai dasar.

Tabel 3.26
IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK

IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	5,0	3,42	3,42	-	-	-

IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat implementasi nilai dasar BPK oleh pegawai. Pengukuran IK ini juga dilakukan melalui survey kepada pegawai. Target yang ditetapkan untuk IK ini pada tahun 2018 adalah 5. Hasil survey atas IK 3.1.1 adalah 4,73. Walaupun tidak dapat memenuhi target tahun 2018, hasil survey menunjukkan bahwa tingkat implementasi pegawai atas nilai dasar BPK ada dalam kategori Sangat Baik.

Tabel 3.27
IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	4,73	4,73	-	-	-

IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

IK ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai. Selama tahun 2018, tidak ada pegawai BPK Perwakilan Kepulauan Riau yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan disiplin sehingga realisasi IKU 3.1.3 adalah 100%. Realisasi ini sama dengan target sebesar 100%.

Tabel 3.28
IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	100%	-	-

S 3.2 Menciptakan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan

IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja

IK ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh satker. Realisasi IK 3.2.1 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 adalah “BB” atau “Sangat Baik”. Hasil evaluasi ini lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yakni “A”.

Tabel 3.29
IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja

IK	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	A	BB	A	A	-

Dalam pelaksanaan evaluasi atas SAKIP, Itama menilai 5 (lima) komponen Manajemen Kinerja yakni Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Hasil evaluasi Itama menunjukkan bahwa dalam implementasi SAKIP di BPK

Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau masih perlu peningkatan khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja yang hanya memperoleh nilai 9,89 dari bobot 15,00. Selain itu, komponen Pengukuran Kinerja juga perlu mendapat perhatian khususnya menyelaraskan antara ukuran kinerja Eselon II dengan ukuran kinerja Eselon III dan Eselon IV.

Untuk meningkatkan implementasi SAKIP, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan menindaklanjuti rekomendasi dari Itama untuk tiap komponen Manajemen Kinerja tersebut antara lain:

1. Berkoordinasi dengan Direktorat PSMK dan Biro SDM untuk mengidentifikasi dan menetakan ukuran kinerja tingkat Eselon III dan Eselon IV yang selaras dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II;
2. Menyempurkan laporan kinerja dengan meningkatkan kualitas informasi perbandingan capaian tahun berjalan dengan target kinerja jangka menengah, analisis efesiensi penggunaan sumber daya serta informasi keuangan untuk mencapai sasaran.

IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi (TI)

IK ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Tingkat pemanfaatan TI diperoleh dari Laporan IT *Culture* dari Biro TI. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tingkat pemanfaatan TI BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 sebesar 83,37%. Realisasi IK ini lebih besar dari target tahun 2018 sebesar 80%. Realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017, khususnya tingkat pemanfaatan *email* dan *eDrive* yang mencapai 96,16%. Upaya yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan capaian IK 3.2.2 adalah dengan melakukan sosialisasi dan imbauan secara kontinu terkait pemanfaatan layanan dasar dan aplikasi TI .

Tabel 3.30
IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	83,37%	83,37%	68,95%	85,03%	100%

IK 3.2.3 Jumlah *Best-Practice* yang Disusun

IK 3.2.3 bertujuan mengukur tingkat penyusunan jumlah *best practice* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satuan kerja. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengajukan 1 (satu) usulan *best practice* yakni “Pemanfaatan Database Peminjaman Kendaraan Operasional”. Melalui Nota Dinas No. 889/ND/XII.1/12/2018, Direktorat PSMK

menyatakan bahwa usulan tersebut lolos validasi dan dapat menjadi capaian IK 3.2.3. Realisasi IK 3.2.3 sama dengan target yakni 1 (satu) *best practice*.

Tabel 3.31
IK 3.2.3 Jumlah *Best-Practice* yang Disusun

IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	1	1	-	-	-

IK 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best Practice*

IK ini mengukur tingkat penerapan *best practice* yang telah diakui oleh BPK. Dalam rangka mencapai target IK 3.2.4, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mereplikasi *best practice* Direktorat EPP yakni “Pemanfaatan Portal EPP dalam Penyusunan IHPS dan Penyimpanan Arsip IHPS”. Unsur-unsur yang direplikasi dari *best practice* tersebut antara lain pemanfaatan dan fungsi portal perwakilan sebagai media penyimpanan dan *file sharing*. Hasil evaluasi Ditama Revbang menunjukkan bahwa tingkat penerapan *best practice* BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 sebesar 100% atau sama dengan target 100%.

Tabel 3.32
IK 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best Practice*

IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	100%	-	-	-

IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja

IK ini bertujuan untuk mendorong satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja Triwulanan dan Laporan Output secara tepat waktu. Realisasi IK 3.2.5 tahun 2018 sebesar 100% atau sama dengan target 100%.

Tabel 3.33
IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja

IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100%	-	-	-

IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

IK ini bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai. Realisasi IK 3.2.6 tahun 2018 sebesar 94,09% atau lebih tinggi dari target sebesar 94%.

Tabel 3.34
IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

IK	Target 2018	Realisasi 2017	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	94%	94,09%	94,09%	92,37%	90,02%	89,68%

Untuk mencapai realisasi IK 3.2.6 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.35
Rincian Anggaran dan Belanja Pendukung IKU 1.2.2 (Rupiah)

Nama Keluaran	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
Layanan Internal (Overhead)	200.000.000,00	199.750.000,00	99,88

IK 3.2.7 Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan

IK ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK RI, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarkan hasil pemeriksaan BPK RI secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis serta saling mendukung dengan media massa. Kegiatan *media relation* di BPK Perwakilan Kepulauan Riau selama tahun 2018 adalah penerbitan siaran pers penyampaian LHP (nilai 0,8) sebanyak 2 (dua) kali. Realisasi IK 3.2.7 tahun 2018 sebesar 1,6 atau lebih tinggi dari target sebesar 1.

Tabel 3.36
IK 3.2.7 Jumlah *Media Relation* Yang Dilaksanakan

IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Jumlah <i>Media Relation</i> Yang Dilaksanakan	1	1,6	1,6	1,8	2	1,5

S 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan

IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan satker dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah berusaha memenuhi standar jam pelatihan untuk tiap pemeriksa dengan melaksanakan *in-house training*, *Knowledge Transfer Forum (KTF)*, dan mengirimkan pemeriksa untuk mengikuti diklat di Pusdiklat maupun Balai Diklat sehingga

target IK 3.3.1 sebesar 100% dapat tercapai. Realisasi ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.37
IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	94,87%	45,71%

IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan satuan kerja dalam pengembangan kompetensi pegawai penunjang dan pejabat struktural melalui pendidikan dan pelatihan. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah berusaha memenuhi standar jam pelatihan untuk tiap pegawai dengan melaksanakan *in-house training* dan mengirimkan pemeriksa untuk mengikuti diklat di Pusdiklat maupun Balai Diklat sehingga target IK 3.3.2 sebesar 100% dapat tercapai. Realisasi ini juga mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.38
IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100%	96,43%,	96,15%,	-

S 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan

IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

IK ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Tingkat implementasi diukur dari 4 (empat) unsur yakni penyerapan anggaran, pencapaian keluaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi serta nilai efisiensi. Berdasarkan data dari Biro Keuangan, persentase masing-masing unsur tersebut adalah penyerapan anggaran (96,69%), pencapaian keluaran (99,80%), konsistensi (69,28%) serta nilai efisiensi (58,13%). Secara keseluruhan tingkat atau nilai implementasi anggaran BPK Perwakilan

Kepulauan Riau Tahun 2018 sebesar 82,03% atau kategori Baik. Namun realisasi ini masih lebih kecil dari target 85%.

Upaya yang akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan capaian IK 3.4.1 tahun selanjutnya adalah dengan meningkatkan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran serta melakukan penajaman kepada kegiatan prioritas, efisiensi, dan optimalisasi terhadap pagu anggaran.

Tabel 3.39
IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

IK	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	82,03%	82,03%	86,25%	92,80%	-

B. REALISASI ANGGARAN BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pada tahun 2018, BPK memiliki anggaran sebesar Rp18.609.632.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.014.785.915,00. Rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 3.40
Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2018 (Rupiah)

Kode	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
51	Belanja Pegawai	4.778.607.000	4.734.931.123	99,09
52	Belanja Barang	13.631.025.000	13.080.104.792	95,96
53	Belanja Modal	200.000.000	199.750.000	99,88
JUMLAH		18.609.632.000	18.014.785.915	96,80

Sedangkan menurut jenis output, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.41
Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Jenis Output Tahun 2018 (Rupiah)

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Rumusan Bahan Pendapat	16.185.000,00	15.050.600,00	92,99
2	Layanan Administrasi Pemeriksaan	519.970.000,00	508.917.129,00	97,87
3	Sumbangan IHPS	73.168.000,00	70.466.733,00	96,31
4	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	685.825.000,00	679.873.470,00	99,13
5	LHP Perwakilan	4.590.326.000,00	4.374.339.657,00	95,29
6	Laporan Pemantauan Perwakilan	535.896.000,00	406.678.164,00	75,89
7	Laporan Profil Entitas	31.020.000,00	7.162.000,00	23,09

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
8	Layanan Sekretariat Perwakilan	2.553.582.000,00	2.524.226.395,00	98,85
9	Layanan Internal Overhead	200.000.000,00	199.750.000,00	99,88
10	Layanan Perkantoran	9.403.660.000,00	9.228.321.767,00	98,14
JUMLAH		18.609.632.000	18.014.785.915	96,80

C. PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018

Pada tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berhasil memperoleh beberapa penghargaan sebagai berikut.

1. Satuan Kerja Terbaik Ketiga Pelaksanaan Anggaran dengan Pagu Belanja diatas Rp15.000.000.000,- Periode Semester I Tahun 2018 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Batam; dan
2. Juara Ketiga Pengelola Aset Terbaik dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

Gambar 3.2 Piagam Penghargaan Kinerja Terbaik Ketiga



Gambar 3.3 Piagam Penghargaan Pengelola Aset Terbaik



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai cerminan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018. Sebagai bagian dari AKN V dan BPK RI, cerminan kinerja ini juga menjadi sumbangan atas kinerja AKN V dan BPK RI. Secara umum capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik dengan memperoleh skor pencapaian kinerja tahun 2018 sebesar 98,28. Namun skor tahun 2018 lebih rendah dari skor tahun 2017 sebesar 99,88.

Penurunan skor kinerja tahun 2018 disebabkan 5 (lima) indikator kinerja belum mencapai target yang ditetapkan dan perlu menjadi perhatian pada masa mendatang yakni.

1. IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
2. IK 3.1. Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK;
3. IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
4. IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja;
5. IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.

Selain penurunan capaian pada beberapa indikator kinerja, pada tahun 2018 juga terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang mengalami peningkatan capaian yakni.

1. IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP;
2. IK 2.1.2 Indeks Kepuasan *Auditee* Atas Kinerja Pemeriksa BPK;
3. IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
4. IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana;
5. IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

Berkenaan dengan penurunan skor kinerja tahun 2018, beberapa cara yang akan ditempuh oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk memperbaiki pencapaian kinerja di masa yang akan datang antara lain.

1. Mendorong *auditee* untuk melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pada tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mendorong pemanfaatan SIPTL oleh *auditee*. Selain itu, upaya yang masih akan terus dilakukan adalah mengintensifkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran;
3. Meningkatkan upaya internalisasi visi, misi dan nilai dasar melalui sosialisasi, surat edaran dan pemanfaatan media publikasi seperti poster atau *banner* tentang visi, misi dan nilai dasar;
4. Menindaklanjuti rekomendasi dari Itama atas hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun 2017.

Dengan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat mengetahui hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga menjadi dasar BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun target pencapaian kinerja pada tahun berikutnya. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan tetap berbenah dan terus meningkatkan kinerja perwakilan pada masa yang akan datang.

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT UNIT ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Unit Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Tahun Anggaran : 2018

Indikator Kinerja		Target 2018	Realisasi 2018	Skor 2018
SS 1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan			
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	59,97%	92,26
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan Yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100
S 1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan			
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	100%	105
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	31%	31,25%	100,81
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	80%	100
S 1.2	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara			
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	16	16	100
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100
S 2.1	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan			
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,1	4,67	105
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100
IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100
S 3.1	Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan			
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	5,0	3,42	68,4
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	4,73	94,6
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100
S 3.2	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan			
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	BB	88,89
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	83,37%	104,21
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	1	100
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	100
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	94%	94,09	100,09
IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	1	1,6	105
S 3.3	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan			

Lampiran

Indikator Kinerja		Target 2018	Realisasi 2018	Skor 2018
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100
IK 3.2.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100
S 3.4	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan			
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	82,03%	96,5

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp18.609.632.000,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp18.014.785.915,00